



## **KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450  
Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755  
Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id), Email: kyri@komisiyudisial.go.id

---

**Nomor: 18/SIARAN PERS/AL/LI.04.05/05/2025**

**UNTUK DITERBITKAN SEGERA**

Jakarta, 20 Mei 2025

### **Januari–April 2025, KY Terima 302 Permohonan Pemantauan dan Inisiatif**

**Jakarta (Komisi Yudisial)** - Komisi Yudisial (KY) menerima 225 permohonan pemantauan persidangan dan 77 inisiatif KY pada Januari–April 2025 sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Pemantauan persidangan adalah langkah pencegahan agar hakim dapat mematuhi KEPPH pedoman dan panduan berperilaku bagi hakim untuk mencapai kondisi peradilan yang ideal. Hakim diharapkan bersikap independen dan imparial dalam memutuskan, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun," ujar Joko saat menggelar konferensi pers, Selasa (20/5/2025).

Berdasarkan jenis perkara, Joko memperinci lebih lanjut perkara-perkara yang dimohonkan untuk dilakukan pemantauan persidangan. Yaitu perdata (131), tipikor (31), pidana biasa (34), praperadilan (21), Tata Usaha Negara (20), anak berhadapan dengan hukum (10), perdagangan manusia (5), lingkungan (4), pilkada (3), Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE (3), hubungan industrial (3), narkoba (3), niaga (2), perempuan berhadapan dengan hukum (2), tindak pidana militer (1), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU (1), sengketa informasi publik (1), dan lainnya (17).

"Sepuluh provinsi yang paling banyak melakukan permohonan pemantauan dan inisiatif, yaitu Jakarta (90), Jawa Barat (24), Sumatera Utara (21), Jawa Timur (19), Jawa Tengah (18), Sumatera Selatan (14), Kalimantan Timur (14), Riau (13), Aceh (11), dan Nusa Tenggara Timur (10)," tambah Joko.

Adapun dilihat dari jenis badan peradilan, masih didominasi oleh pengadilan negeri (217), kemudian Mahkamah Agung (39), pengadilan tinggi (18), pengadilan tata usaha negara (15), pengadilan agama (7), pengadilan tinggi tata usaha negara (4), Mahkamah Syar'iyah (1), dan pengadilan militer (1).

Sebagai hasil tindak lanjut permohonan pemantauan, pemantauan langsung (61), pemantauan melalui surat (38), dan dilimpahkan ke bagian lain (126). Adapun objek pemantauan persidangan yang diamati meliputi perilaku hakim, proses persidangan, serta pemantauan pada situasi dan kondisi pengadilan.

"Karena pemantauan bersifat pencegahan, hakim yang dipantau cenderung berperilaku sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam proses persidangan, hakim juga telah menerapkan hukum acara yang sesuai. Misal, hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Hakim juga mengedepankan praduga tak bersalah. Terkait situasi dan kondisi pengadilan, sidang juga berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. KY juga mengamati fasilitas dan dukungan pengadilan yang cukup baik," ungkap Joko.

Peraih Guru Besar Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) juga ini menyoroti kasus-kasus yang menarik perhatian publik. KY melakukan pemantauan persidangan pada kasus suap yang melibatkan majelis hakim terdakwa GRT dan mantan pejabat MA berinisial ZR, praperadilan Sekjen PDIP, kasus pelecehan seksual di bawah umur yang melibatkan seorang penyandang disabilitas di Mataram, kasus pembunuhan pemilik rental mobil, kasus korupsi importasi gula yang melibatkan mantan menteri perdagangan tahun 2015 - 2016, dan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dan wanprestasi mobil esemka di PN Surakarta.

\*\*\*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**Pusat Analisis dan Layanan Informasi KY**

Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat,

(021) 3906189

[www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

email: [humas@komisiyudisial.go.id](mailto:humas@komisiyudisial.go.id)